

ABSTRAK

Polusi udara di Jakarta pada periode 2021–2023 menjadi permasalahan lingkungan yang mendesak karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Dalam konteks ini, Greenpeace Indonesia mengambil peran aktif mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar lebih responsif terhadap isu tersebut, meskipun tidak terikat dalam kerja sama formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi advokasi dan kampanye yang digunakan Greenpeace Indonesia dalam mempengaruhi kebijakan publik terkait pengendalian polusi udara. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teori Organisasi Internasional dari Clive Archer, penelitian ini mengeksplorasi bentuk interaksi antara Greenpeace Indonesia dan Pemprov DKI Jakarta sebagai aktor non-negara dan negara dalam sistem internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui strategi kampanye digital, pelibatan komunitas, serta kolaborasi dengan akademisi dan media, Greenpeace Indonesia berhasil meningkatkan kesadaran publik dan memberi tekanan moral-politik yang signifikan terhadap Pemprov DKI Jakarta. Temuan ini menegaskan bahwa organisasi masyarakat sipil dapat memainkan peran penting dalam mendorong respons kebijakan lingkungan, terutama ketika mekanisme formal tidak tersedia.

Kata kunci: Greenpeace Indonesia, polusi udara, advokasi, Pemprov DKI Jakarta.

ABSTRACT

Air pollution in Jakarta during the 2021–2023 period became an urgent environmental issue due to its direct impact on public health. In this context, Greenpeace Indonesia actively pushed the Provincial Government of DKI Jakarta to become more responsive, despite the absence of any formal cooperation agreement. This study aims to analyze the advocacy and campaign strategies used by Greenpeace Indonesia to influence public policy on air pollution control. Using a qualitative descriptive approach and Clive Archer's theory of International Organizations, this research explores the interaction between Greenpeace Indonesia and the DKI Jakarta Government as non-state and state actors in the international system. The findings show that through digital campaigns, community engagement, and collaboration with academics and media, Greenpeace Indonesia effectively raised public awareness and exerted moral-political pressure on the DKI Jakarta Government. These findings affirm the vital role of civil society organizations in shaping environmental policy responses, particularly when formal mechanisms are absent.

Keywords: Greenpeace Indonesia, air pollution, advocacy, DKI Government.